GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0599 /KUM/2018

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan upaya konkrit melalui pemberian upah yang lebih realistis;

b. bahwa untuk merealisasikan hal sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0221/KUM/2015 tentang Penetapan Keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2015-2018;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0570/KUM/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Perusahaan dilarang membayar Upah Minimum lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bagi pekerja yang berstatus tetap dan dalam masa percobaan upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Sektoral hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1(satu) tahun.

KEEMPAT : Upah Minimum Sektoral Provinsi *Kalimantan* Selatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur ini adalah Upah Minimum bulanan terendah untuk waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu.

KELIMA : Upah Minimum Sektoral Provinsi yang belum ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, diberlakukan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan.

KEENAM : Bagi Kabupaten/Kota yang tidak *menetapkan* Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota, maka Upah Minimum Sektor Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur ini berlaku dan apabila angka upah Minimum Kabupaten/Kotanya lebih besar dari Upah Minimum Sektor Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, maka yang diberlakukan adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota daerah setempat, dan/atau Upah Minimum Kabupaten/Kotanya lebih rendah dari Upah Minimum Sektor Provinsi, maka yang berlaku adalah Upah Minimum Sektor Provinsi.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0569/KUM/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Nopember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan.
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

6. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kalimantan Selatan.
7. Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Selatan di Banjrmasin.
8. Ketua Apindo Provinsi Kalimantan Selatan di Banjrmasin.
9. Kepala Dinas/Kantor yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ /KUM/2018
TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019

DAFTAR UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019

NO.	UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI	BESARNYA (Rp)
1	2	3
1.	Pertambangan Batubara	Rp2.670.000,00
2.	Perkebunan Kelapa Sawit	Rp2.657.500,00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR